

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran 2020 Diprotes Warga

Belum Berpihak ke Orang Miskin

JAKARTA - Puluhan emak-emak di Jakarta geruduk kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (13/11/2019). Mereka memprotes mata anggaran yang diusulkan oleh eksekutif di 2020 tidak berpihak ke rakyat miskin. Kebanyakan alokasi anggaran yang diusulkan terkesan pemborosan.

Seperti yang diketahui, anggaran perlindungan sosial di dalam APBD DKI pada 2018 sebesar Rp1,92 triliun, lalu turun di 2019 menjadi Rp 1,57 triliun. "Sementara banyak mata anggaran yang malah diusulkan tidak berpihak ke rakyat miskin. Dan lebih tepatnya melakukan pemborosan," ujar Marlo, salah seorang pengunjuk rasa, Rabu (13/11/2019).

Marlo mencatat, kini dari 264.799 rumah tangga miskin di Jakarta, hanya 65 ribu keluarga miskin mendapatkan program Keluarga Harapan (PKH). Sementara, dalam mata anggaran yang tengah dibahas bersama eksekutif dan legislatif tidak berdampak langsung ke masyarakat. "Artinya masih ada sekitar 200 ribu Keluarga Miskin yang belum menerima PKH, dan sebanyak 94.788 Keluarga Miskin belum mendapatkan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)," jelas dia.

Padahal, berdasarkan postur keuangan APBD Pemprov DKI, kata dia, sebenarnya memiliki kemampuan untuk membiayai warga miskin. Sebab, nilai pagu anggaran yang tertulis dalam Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 sangat besar. "Gubernur dan DPRD harus memiliki keseriusan mengalokasikan anggaran yang berdampak ke rakyat miskin," tandas dia.

Sebab sekarang ini, sambung Marlo, untuk menutupi 200 ribu keluarga miskin yang belum masuk sebagai Penerima Keluarga Harapan, sedikitnya dibutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp600 miliar. Dengan asumsi, setiap Kepala Keluarga mendapat bantuan sebesar Rp3 jutaan per tahun.

Rendahnya komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin, tegas dia, sangat bertentangan dengan janji para pimpinan di legislatif dan eksekutif. "Bagaimana mungkin Kota Jakarta bisa maju bahagia warganya, bila masih ada ratusan ribu keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dan jaminan untuk dapat tumbuh sejahtera," sambung dia.

Mengomentari hal itu, Pengamat Tata Kota Nirwonmo Joga mengatakan, Pemprov DKI seharusnya lebih gencar lagi untuk program pengentasan kemiskinan. Bahkan hanya soal angka, tetapi indikator fisiknya juga harus jelas. "Seperti kampung kumuh seharusnya berkurang bukan malah sebaliknya," kata dia.

Nirwono menambahkan, Indeks Keparahan Kemiskinan dan persentase Garis Kemiskinan Makanan yang naik, menunjukkan bahwa pemprov DKI Jakarta perlu membangun ketahanan pangan lokal yang mandiri dan harus ada redistribusi pangan yang lebih baik lagi. "Penyandang penyakit masalah kesejahteraan sosial masyarakat seperti pengemis, gelandangan, pengamen, juga harus berkurang signifikan," tandas dia.

Tak Sesuai Visi Misi Gubernur

Kalangan DPRD DKI Jakarta menilai, anggaran yang disusun dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020 belum sesuai dengan visi dan misi Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya, tidak memprioritaskan banjir dan kemacetan ibu kota.

Informasi yang dihimpun, salah satu visi misi Anies Baswedan, yang juga terus digaungkan saat kampanye Pilkada DKI 2017, yakni meningkatkan Realisasi Rencana Program (daya serap anggaran) untuk memperluas cakupan dan efektivitas program-program penanggulangan banjir dan kemacetan, rehabilitasi, dan pemeliharaan lingkungan hidup, serta pengelolaan sampah.

Bahkan, penanganan banjir tersebut dimasukkan dalam sebuah perjanjian kinerja Pemprov DKI untuk diimplementasikan di 2019. Perjanjian itu diatur dalam sebuah Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI No 1180/2019 tentang Perjanjian Kinerja Pemprov DKI Jakarta tahun 2019.

Dalam Kepgub tersebut, tercantum 10 sasaran yang harus dirampungkan Pemprov DKI di 2019. Dua di antaranya adalah meningkatkan fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi. Targetnya, hanya ada tujuh titik genangan banjir di DKI Jakarta.

Lalu, terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan dan terjangkau bagi semua warga Jakarta. Dengan target public transportation modal share mencapai 22 persen.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai, anggaran dalam Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020 belum sesuai dengan visi dan misi gubernur DKI. Politisi PDI Perjuangan itu melihat masih banyak SKPD yang tidak sungguh-sungguh menyusun anggaran. Masih banyak yang melakukan copy paste anggaran dari 2019 untuk dimasukkan ke anggaran 2020.

"Saya melihat di beberapa rapat pembahasan anggaran di komisi, SKPD hanya copy paste. Enggak ada terobosannya. Ini yang akan saya terobos dalam rapat Banggar besar nanti," ungkap dia kepada INDOPOS di gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Ida Mahmudah. Selama dua pekan lebih melakukan pembahasan anggaran di Komisi D yang membidangi pembangunan, terutama terkait penanganan banjir dan kemacetan, ia melihat kedua program prioritas ini belum terakomodasi dalam Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020.

Justu, ia melihat anggaran penanganan banjir masih sangat minim dibandingkan dengan anggaran penataan trotoar. Anggaran penanganan banjir diajukan sebesar Rp1 triliun. Sedangkan anggaran penataan trotoar diusulkan sebesar Rp1,2 triliun.

"Belum (terakomodasi-red). Program prioritas soal banjir



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran 2020 Diprotes Warga

dan kemacetan ternyata belum terakomodasi dalam Rancangan KUA-PPAS DKI 2020. Memang anggarannya masih sangat kecil. Masih minim," ucap dia.

Begitu juga dengan anggaran kemacetan yang dinilainya masih minim. Dinas Bina Marga DKI hanya mengajukan anggaran sebesar Rp500 miliar untuk pembangunan enam ruas jalan tol. Karena itu, dalam rapat pembahasan anggaran, Selasa (12/11/2019), Komisi D memangkas anggaran penataan trotoar sebesar Rp204 miliar. Dari awalnya sebesar Rp1,2 triliun menjadi Rp1 triliun.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah anggaran yang disusun dalam Rancangan KUA-PPAS APBD DKI 2020 tidak fokus pada penanganan banjir dan kemacetan.

Menurut Anies, Pemprov DKI tetap fokus mengerjakan kedua program prioritas tersebut. Hanya saja semua yang dikerjakan Pemprov DKI terhadap dua program itu tidak terberitakan media. "Enggak-lah. Ini soal pemberitaan saja. Kalau dikerjakan sih, semuanya dikerjakan. Tidak semua yang kita kerjakan itu terberitakan. Tapi kita siapkan semuanya. Pengerukan di waduk dan sungai jalan terus," kata dia.

Anies menegaskan, anggaran penanganan banjir dan kemacetan sudah menjadi anggaran rutin yang pasti selalu akan dimasukkan dalam APBD DKI. Sedangkan penataan dan pembangunan trotoar merupakan anggaran non-rutin.

"Ada anggaran yang harus dikerjakan tahun ini (pembangunan trotoar, Red) dan ada yang dikerjakan rutin (penanganan banjir dan kemacetan-red). Jadi sesungguhnya semuanya kita lakukan. Kalau yang namanya banjir, pada akhirnya itu adalah soal curah hujan juga. Jadi usaha yang kita lakukan adalah ikhtiar manusianya. Insyaallah kita aman," lanjut Anies.

Rawan 'Anggaran Titipan'

Pembahasan Rancangan APBD DKI Jakarta 2020 rawan titipan. Terlebih, banyak dana-dana yang diajukan oleh dinas-dinas yang ada di Pemrov bernilai fantastis dan dianggap janggal. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengungkapkan, adanya potensi 'titipan anggaran' para anggota dewan melalui program dalam proses penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

"Adanya potensi anggota dewan 'titip anggaran' ke dinas sangat kental. Karena kalau saya lihat itu terjadi di berbagai program maupun anggaran fantastis yang diajukan," kata Trubus saat dihubungi INDOPOS, Rabu (13/11/2019).

Ia mengungkapkan, adanya sistem e-budgeting saat ini tak menjamin hilangnya sepak terjang para mafia anggaran. "Jadi sebelum sampai ke rancangan KUA-PPAS, awalnya kan di Musrenbang, kemudian ke rencana kerja pemerintah (RKP), abis itu diajukan ke dewan. Nah, mafia anggaran munculnya di musrenbang sampai pembahasan. Gimana modusnya? Nanti diakhir sebelum pleno ada penambahan di komponen," ungkap dia.

Di sisi lain, ia mengimbau, pentingnya peran koordinator di setiap komisi yang ada di DPRD DKI. "Sebenarnya koordinator berperan penting dalam menyatakan layak dan tidaknya penyusunan anggaran itu. Bisa juga, dengan alasan layak Koordinator bisa menambahkan entah jumlah, kuantitas atau kualitas program yang akan dilaksanakan," papar Trubus.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menyatakan, kecurigaan soal adanya 'anggaran titipan' itu logis. Pasalnya, adanya anggaran 'janggal' dalam rancangan kebijakan umum

anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) kerap menjadi sorotan. Tidak hanya persoalan anggaran lem aibon hingga anggaran ballpoint (pulpen) yang sempat ramai beberapa waktu lalu, masih terdapat beberapa komponen anggaran yang bernilai fantastis.

Eneng mengungkapkan, pihaknya menyimpan pertanyaan besar kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI perihal beberapa komponen anggaran yang bernilai fantastis. "Sebelumnya sempat ramai, perihal anggaran influencer sebesar Rp5 M. Kemudian, muncul lagi anggaran Formula E sebesar Rp15 M di Dinas Pariwisata," tutur dia kepada INDOPOS di gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Selain itu, lanjut Eneng, dari data yang dihimpun, terdapat beberapa komponen anggaran dalam rancangan KUA-PPAS yang nampak 'janggal' dan bernilai fantastis. "Karena DPRD berhak mempertanyakan anggaran itu," tegas dia.

Antisipasi Pembahasan Molor Pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2020 kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 30 November 2019 terancam molor. Alhasil, untuk mengantisipasi hal tersebut bakal memperpanjang waktu pembahasan dan menggajukannya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, sampai saat ini eksekutif dan legislatif masih membahas dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di DPRD DKI Jakarta.

Pihaknya, bakal mengusulkan perpanjangan waktu pembahasan anggaran kepada Kemendagri. Dia memandang, pembahasan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) di Badan Anggaran setelah KUA-PPAS

membutuhkan waktu yang leluasa, karena ada 30.000 lebih komponen yang akan dibahas.

"Kami akan mengajukan surat kepada Pemrov DKI untuk diteruskan pada Kemendagri, sehingga ada penambahan tenggat waktu," ujar Zita kepada INDOPOS di gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sambung politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, seharusnya kepala daerah dengan legislator menyepakati dokumen KUA-PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Eksekutif dan legislatif kemudian membahas komponen RKA di rapat Banggar.

Setelah selesai, lanjut dia, dokumen yang sudah berubah menjadi R-APBD itu kemudian diserahkan kepada Kemendagri pada 1 Desember 2019 untuk dievaluasi. "Ini kan (pembahasan KUA-PPAS, Red) masih diproses di Komisi B dan C, makanya kami minta penambahan waktu agar pembahasan bisa berjalan efektif," tutur dia.

Menurut Zita, usulan perpanjangan itu diajukan Pemprov DKI kepada Kemendagri melalui rekomendasi DPRD DKI. Namun Zita belum mengetahui berapa lama perpanjangan waktu yang akan diberikan Kemendagri.

"Kami belum tahu berapa lama karena sekarang saja baru pembahasan KUA-PPAS, setelah itu pembahasan R-APBD itu yang paling penting karena ada rincian komponen kegiatan. Nggak mungkin kami membahas komponen yang segitu banyaknya dilakukan selama satu-dua hari," kata dia.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Anggaran 2020 Diprotes Warga

Sebagai wakil rakyat, DPRD memiliki tanggung jawab kepada masyarakat DKI Jakarta dalam mengawal anggaran. Sebab, bila pengesahannya molor, bakal terkena sanksi dari Kemendagri berupa penundaan hak keuangan selama enam bulan. "Kami punya tanggung jawab jadi harus on time, karena sebelum akhir tahun sudah harus disahkan. Jadi kami minta tambahan waktu agar bisa membahas komponen lebih detail," ungkap dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, dokumen Rancangan APBD tersebut akan dievaluasi selama 15 hari. Setelah itu dokumen itu dikembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dikaji ulang selama tujuh hari atau sepekan.

"Setelah itu kami lapor lagi kepada DPRD. Ini loh evaluasi Kemendagri dan kalau ada evaluasi dari Kemendagri, kami rapikan dokumennya supaya 1 Januari 2019 APBD 2020 bisa berjalan," tukas dia. (dny/aen)